

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Hukum dan Peradilan*, Offset Alumni, Bandung.
- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin et all. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya, cetakan ketiga*, Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halili, Hasrul et all. 2012. Kuliah Kerja Nyata, “Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Keadilan”, PusatKajian Anti (PuKAT) Korupsi UGM, Yogyakarta.
- Lubis, Mochtar .2008. *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Luthfi Kurniawan J, et al. 2003. *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans Malang, Malang.
- Makarao, M. Taufik dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1990. *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia
- Sjahputra, Iman. 2006. *Bunga Rampai Lorong Keadilan dalam Perspektif Hukum Kritis*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Iman Sjahputra & Associates, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto. 2003. *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryanto, Agus et all. 2012. *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supeno, Hadi. 2009. *Korupsi di Daerah (kesaksian, pengalaman dan Pengakuan)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Aloysius. 2009. *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Republik Indonesia. 2001. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074;

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

Republik Indonesia. 1998. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Republik Indonesia. 1946. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Republik Indonesia. 1981. Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Lembaran Negara Regara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3209);

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentanh Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738.

C. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 304/Pid.Sus/PN.TK

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 253K/Pid.Sus/2012

D. Jurnal Hukum

Bestari, Mitra. 1 April 2014. “ *Conflictus Legem*”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 7, Jakarta Pusat, 14 Oktober 2015.

Esing, Melky. Oktober-Desember 2012. “*Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi*”, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lecrimen/articel/download/908/723>, Vol. I/No. 4, 14 Oktober 2015.

Ariawan, Ahmad Indra. 2013. “ *Tinjauan Tentang Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, <http://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2014/05/TINJAUAN-KEWENANGAN-POLRI-DALAM-PENYIDIKAN-KASUS-KORUPSI.PDF>, 15 Oktober 2015.

Ramelan, “*Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi*”,

<http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabase/41338/mhn050111.pdf>, 15 Oktober 2015.

E. Skripsi

- Ajie. Bintang Wicaksono. 2014. *“Pemeriksaan Perkara Pidana secara In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pane. Anita Meilyna S. 2014. *“Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Penyertaan/Deelneming (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar di Kabupaten Sleman)”*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wulanningrung. Rr. Anna Sekar. 2010. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 29/Pid. B/2000/PN.KAB.MGL dan Putusan No. 419/Pid.B/2009/PN.MLG)”*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.